



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
2023**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR	2
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang.....	4
2. Maksud dan Tujuan.....	5
3. Tupoksi dan Struktur Organisasi.....	5
4. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama.. ..	8
5. Sumber Daya Organisasi	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. PERENCANAAN STRATEGIS	11
1. Tujuan	11
2. Sasaran	12
3. Strategi dan Arah Kebijakan	13
4. Program	14
5. Kegiatan	14
B. PERJANJIAN KINERJA	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016	19
B. REALISASI ANGGARAN	23
1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan.....	23
2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Pembangunan	24
3. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	25
4. Realisasi Anggaran	25
BAB IV PENUTUP	28

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Kami Panjatkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah SWT, karena atas berkah rahmat dan hidayah-Nya semata, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja suatu instansi pemerintah. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran instansi pemerintah dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan ini disusun dalam rangka untuk memenuhi kelengkapan laporan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja.

Semoga dengan disusunnya Laporan Kinerja ini bermanfaat untuk menunjang kelancaran dalam pelaksanaan tugas.

Wassalammu'alaikum. Wr. Wb.

Sampang, Januari 2023
KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN SAMPANG

ANANG DJOENAEDI SANTOSO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660125.199403.1.008

A. Latar Belakang

Laporan kinerja disusun sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan untuk memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam peraturan tersebut diwajibkan kepada setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang didasarkan pada suatu Perencanaan Strategis.

Rangkaian program / kegiatan Tahun 2022 adalah bagian integral dalam mendukung pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 Pemerintah Kabupaten Sampang, dan diakumulasikan dalam beberapa program utama dalam Pembangunan Tahun 2022 yaitu seperti kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter, Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi

Politik, Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Dari uraian pengertian diatas , Laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang dalam melaksanakan kegiatan yang bersumber dana APBD Tingkat II, dituangkan dalam Laporan Kinerja. Keberhasilan pembangunan kesatuan bangsa dan politik yang telah diraih selama ini dan masa yang akan datang tidak lepas dari peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang dalam menjalankan fungsimanagemen organisasi.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik bersih danberwibawa (Good Governance and Clean Government) di Indonesia sebagaimana telah diamanatkan oleh rakyat melalui Tap MPR Nomor IX Tahun 1998.

B. Maksud Dan Tujuan.

Maksud penyusunan LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2022 adalah :

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022;
2. Memberikan gambaran dan informasi atas capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Tujuan, dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang;
3. Memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2022.

Tujuan penyusunan LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2022 adalah :

1. Mewujudkan pertanggungjawaban kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang atas tugas dan fungsi yang dibebankan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang;
2. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja perencanaan dan penyelenggaraan program dan kegiatan maupun pemberdayaan sumber daya di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang secara umum;

3. Terlaksananya program dan kegiatan secara efisien, efektif, dan responsif serta tanggap terhadap kondisi penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
4. Menyediakan laporan kepada pimpinan dalam pengambilan keputusan.

C. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang mengacu pada fungsi-fungsi Bakesbang dan Politik antara lain:

- Penyusunan kebijakan teknis dan strategi Pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam jangka pendek dan menengah.
- Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan pengembangan sistem politik.
- Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu.
- Pelaksanaan fasilitasi kegiatan integrasi bangsa
- Pelaksanaan kewaspadaan dibidang kesatuan bangsa dan politik
- Pelaksanaan fasilitasi bidang budaya politik
- Pengkoordinasian kegiatan kesatuan bangsa dan politik dengan instansi dan atau lembaga terkait.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan kesatuan bangsa dan politik.
- Pelaksanaantugas-tugasKetatausahaan.
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

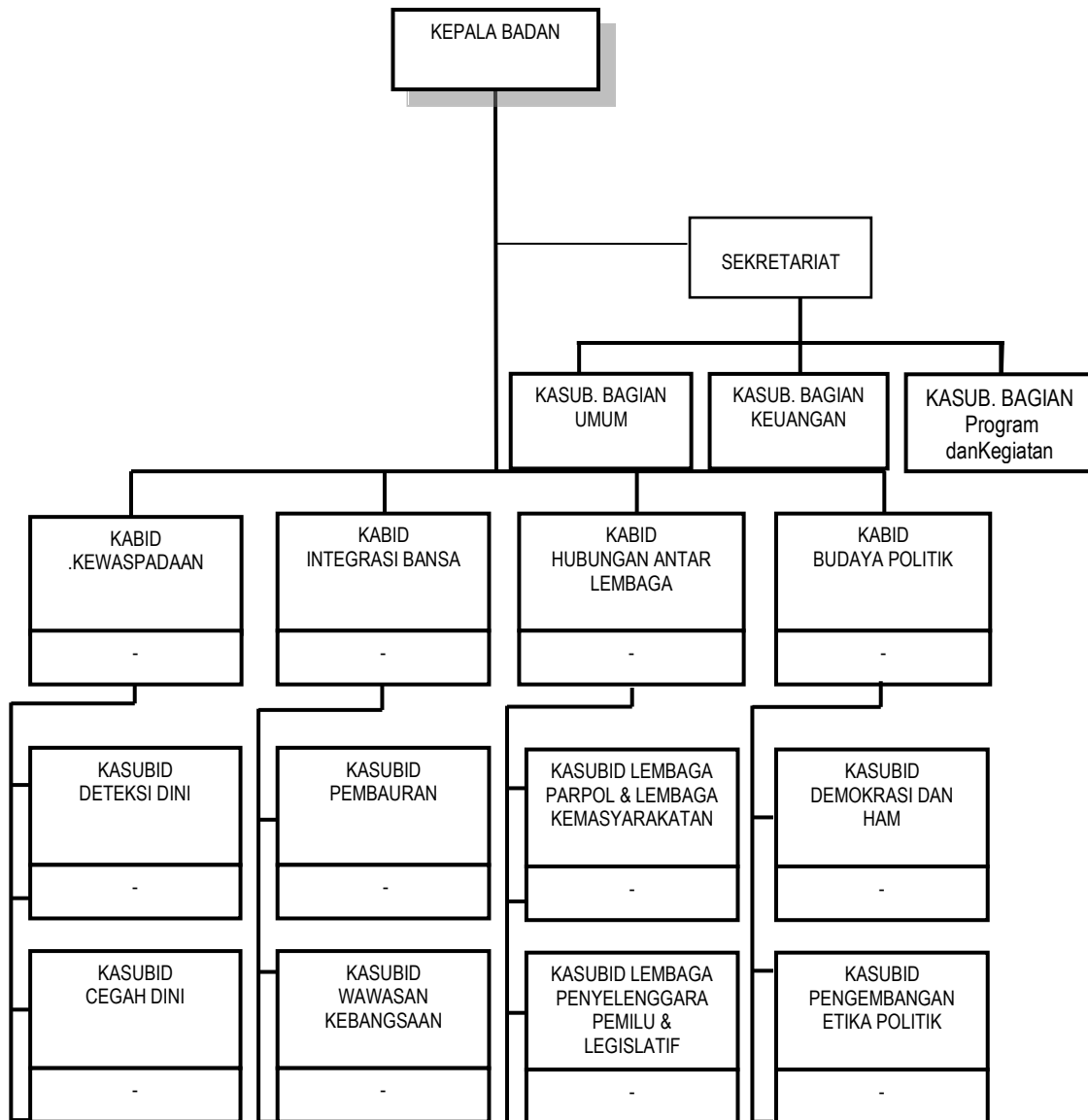
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang berdasarkan Peraturan Bupati Sampang No. 58 Tahun 2008 Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang terdiri dari :

1. Kepala Badan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Bupati Sampang, dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh satu orang Sekretaris dan empat Kepala Bidang.
2. Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program dan Kegiatan
3. Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga membawahi:
 - a. Sub Bidang Lembaga Partai Politik dan Lembaga Kemasyarakatan
 - b. Sub Bidang Lembaga Penyelenggaraan Pemilu dan Legislatif
4. Kepala Bidang Integrasi Bangsa membawahi :
 - a. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan
 - b. Sub Bidang Pembauran
5. Kepala Bidang Budaya Politik membawahi :
 - a. Sub Bidang Demokrasi dan Hak Asasi Manusia
 - b. Sub Bidang Pengembangan Etika Politik
6. Kepala Bidang Kewaspadaan membawahi :
 - a. Sub. Bidang Deteksi Dini
 - b. Sub Bidang Cegah Dini

Sekretariat dan masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang terdiri dari :

Bagan Struktur Organisasi Bakesbang dan Politik Kab. Sampang



D. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (strategic issued)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sampang No. 58 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang mempunyai tugas pokok :

“ Membantu Bupati dalam Melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah dan Tugas Pembantuan, serta Melakukan Pembinaan, Koordinasi, Pengawasan, dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri “
Sedangkan Permasalahan Utama (strategi issue) yang dihadapi Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang adalah :

- Belum optimalnya peran kewaspadaan dini masyarakat sampai dengan jenjang paling bawah, Maraknya kasus narkoba terutama yang melibatkan generasi muda
- Belum semua organisasi kemasyarakatan ikut berperan aktif dalam peningkatan pembangunan di Kabupaten Sampang.
- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi dalam iklim politik yang dinamis
- Belum optimalnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan nilai-nilai luhur dan jati diri bangsa

E. Sumber Daya Organisasi

Dalam penyelenggaraan kegiatan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang di dukung oleh sumber daya manusia yang memadai. Sebagai gambaran berikut ini diinformasikan Jumlah Pegawai Negeri Sipil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang yang dirinci menurut pangkat/golongan sebagai berikut:

Tabel 1.1
DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN
BAKESBANG DAN POLITK KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022

Nomor	Pendidikan	Jumlah
1.	S 2	13
2.	S 1	14
3.	Sarmud / D-3	3
4.	SMA	8
5.	SMP	1
J u m l a h		39

Sumber : Bakesbang & Politik Kab. Sampang, 2022

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	30 orang
2	Perempuan	9 orang
Jumlah		39 orang

Sumber : Bakesbang & Politik Kab. Sampang, 2022

Tabel 1.3
Berdasarkan Pangkat / Golongan

Nomor	Pangkat/Gol.Ruang	Jumlah
1.	Golongan IV	10
	Pembina Utama Muda	1
	Pembina TK.I	1
	Pembina	7
2.	Golongan III	11
	Penata Tk. I	6
	Penata	1
	Penata Muda Tk. I	3
	Penata Muda	1
3.	Golongan II	2
	Pengatur TK.I	2
4.	Golongan I	1
	Juru TK.I	1
5.	Tenaga Maganga	15
J u m l a h		39

Sumber : Bakesbang & Politik Kab. Sampang, 2022

Tabel 1.4
Pendidikan Penjenjangan Aparatur

Nomor	Diklat penjenjangan	Jumlah
1.	Pim II	1
2.	Pim III	5
3.	Pim IV	11
	J u m l a h	17

Sumber : Bakesbang & Politik Kab. Sampang, 2022

F. CASCADING BAKESBANG DAN POLITIK

Berdasarkan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah selanjutnya dijabarkan kedalam Cascading yang merupakan dokumen ernyataan proses penjabaran, penyelarasan dan penurunan kinerja secara bertahap secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah untuk mewujudkan target yang ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dan dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.

**POHON KINERJA / CASCADING
BAKESBANG DAN POLITIK KABUPATEN SAMPANG**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULA	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN / hasil	INDIKATOR KEGIATAN / keluaran	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik	Prosentase Penyelesaian Konflik Sosial	$\frac{\text{Jumlah Konflik Terselesaikan}}{\text{Jumlah Konflik} \times 100}$	Meningkatnya Penyelesaian Konflik Sosial Politik	Persentase Konflik sosial politik yang diselesaikan	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan wawasan kebangsaan	Jumlah Kelompok yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Penguatan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan serta Revitalisasi dan Aktualisasi Ideologi Nilai-Nilai Pancasila	Persentase kelompok yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
											Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Fasilitasi Pembentukan FPK Kab/Kota
					PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Upaya peningkatan Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbudaya politik	Persentase Masyarakat yang mendapatkan pemahaman etika dan budaya politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Penguatan Etika Politik Generasi Muda, Masyarakat dan Penguatan Karakter Pemenuhan Kesadaran HAM serta Penguatan peran Partai Politik dalam Pileg dan Pilpres serta Fasilitasi Dan Verifikasi Bantuan Dana Pada Partai Politik	Prosentase Pembinaan Politik Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
											Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULA	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN / hasil	INDIKATOR KEGIATAN / keluaran	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
											Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Fasilitasi dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi dalam proses politik.	Persentase lembaga demokrasi yang dilegalisasi	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Peningkatan Peran Ormas/Lsm Dalam Pembangunan Kabupaten Sampang	Prosentase LSM yang sudah terdaftar	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Cakupan masyarakat yang mendapatkan sosialisasi Pencegahan Penyakit Masyarakat	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Meningkatkan Peran Serta Semua Elemen Masyarakat dalam mencegah bahaya Narkoba (Penyakit Masyarakat) dan Tim FKUB	Prosentase Pencegahan Penyakit Masyarakat	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULA	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN / hasil	INDIKATOR KEGIATAN / keluaran	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
					PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Konflik	Prosentase Potensi Konflik Sosial ditangani	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Meningkatkan kapasitas jaringan informasi konflik dan Menampung informasi dalam menjaga stabilitas keamanan di Daerah	Prosentase meningkatnya Kewaspadaan daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
											Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terwujudnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Lapor Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
											Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
											Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
											Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
											Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
											Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULA	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN / hasil	INDIKATOR KEGIATAN / keluaran	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
								Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan yang baik dan tepat waktu	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
											Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
											Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
								Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatkan keterampilan teknis ASN dilingkungan Bakesbangpol	Persentase aparat yang mengikuti peningkatan kapasitas aparat	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
								Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
											Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan yang disediakan
											Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
											Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
											Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULA	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN / hasil	INDIKATOR KEGIATAN / keluaran	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
											Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
											Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
								Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit pengadaan kendaraan dinas R2 yang disediakan
											Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
								Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
											Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
											Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
								Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
											Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yg dipelihara
											Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
								Kegiatan Penataan Organisasi	Terwujudnya Penataan Organisasi	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

G. PETA PROSES BISNIS BAKESBANG DAN POLITIK

Dokumen Cascading selanjutnya dibandingkan dengan peta proses bisnis yang merupakan diagram yang menggambarkan ubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi/level untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu factor suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah. Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas system proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan teruku pada masing–masing instansi pemerintah. Jika poses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Peta proses bisnis sendiri merupakan asset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi kedalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi. Tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah untuk menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumberdaya manusia, serta penilaian kinerja. Peta proses bisnis bermanfaat untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, serta memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan. Berikut Peta Proses Bisnis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang :

H. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi (LHE)

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor : 700/416/434.100/2022 Tanggal 12 September 2022 beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja

1. Pada pemenuhan implementasi renstra dokumen anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, namun terdapat ketidaksamaan nama program antara renja dengan DPA meskipun target yang ingin dicapai sama
2. Setiap pegawai perlu memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam sasaran kinerja pegawai (SKP)

B. Pengukuran Kinerja

1. Kualitas Pengukuran

Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum menggunakan teknologi informasi

2. Implementasi Pengukuran

- a) Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian / pengurangan) tunjangan kinerja / penghasilan
- b) Hasil Pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment
- c) Pelaporan Kinerja
 - 1) Informasi yang disajikan belum sesuai kinerja dengan data yang bisa diandalkan
 - 2) Informasi dalam laporan kinerja belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi

D. Evaluasi Internal

1) Kualitas Evaluasi

- a) Evaluasi internal yang dilaksanakan hanya sebatas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai sehingga kurang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja

-
- b) Evaluasi akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja namun tidak didukung oleh data dinas yang berisi evaluasi SAKIP pada masing – masing bidang

2) Pemanfaatan Evaluasi

- a) Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum ditindaklanjuti karena tidak ada bukti laporan tindaklanjut dari hasil evaluasi
- b) Belum adanya ulasan efektifitas dan efisiensi terhadap laporan akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan temuan/hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat kelemahan sehingga direkomendasikan agar dilakukan beberapa perbaikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja

Dalam menyusun Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- 1) Menerapkan anggaran berbasis kinerja dengan mempertanggungjawabkan kinerja sebelum mengajukan anggaran
- 2) Mengaitkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan penganggaran
- 3) Meningkatkan komitmen pegawai dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam sasaran kinerja pegawai (SKP) mulai dari setingkat eselon IV ke atas dengan dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward & punishment

B. Pengukuran Kinerja

1) Kualitas Pengukuran

Agar pengukuran kinerja secara berjenjang dari level staf hingga level tertinggi menggunakan bantuan teknologi

2) Implementasi Pengukuran

- 1) Agar target kinerja eselon III dan IV dimonitor pencapaiannya
- 2) Agar capaian IKU dimanfaatkan untuk penilaian kinerja

C. Pelaporan Kinerja

Dalam laporan kinerja menyajikan informasi sesuai standard an informasi yang disajikan agar digunakan untuk peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

D. Evaluasi Internal

- 1) Lakukan Pemantauan Rencana Aksi untuk mengendalikan kinerja
- 2) Lakukan Pemantauan Rencana AKsi untuk memberikan alternative perbaikan yang dapat dilaksanakan

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang disusun untuk mampu menjawab tuntutan perkembangan pembangunan melalui pentahapan yang konsisten, jelas dan berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Sehingga Rencana Strategis ini dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan pembangunan jangka waktu 2019-2024, dimana didalamnya terdapat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun yang dijabarkan pelaksanaannya dalam program kegiatan, sebagaimana diuraikan lebih lanjut :

1. TUJUAN

Dalam menetapkan tujuan dan sasarannya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang mengacu pada rumusan faktor-faktor kunci keberhasilan yang telah ditetapkan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang sebagai salah satu Organisasi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tujuan yaitu : ” ***Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik*** ”.

Table. 2.1 : Matrik Tujuan

No	Tujuan	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik	Prosentase Penurunan Konflik Sosial Politik

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan - tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Adapun Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang adalah **“Meningkatnya Penyelesaian Konflik Sosial Politik”**. Pelaksanaan pembangunan harus dapat diukur realisasinya. Karena itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang telah menetapkan Indikator Kinerja pada setiap sasaran strategis sebagai alat ukur atas berhasilnya atau kegagalan pembangunan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Sampang selama 5 (lima) tahun kedepan (2019 –2024). Adapun hasil pengukuran keberhasilan dan kegagalan dalam capaian setiap sasaran pembangunan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Sampang Tahun 2020 dengan alat ukur Indikator Kinerja adalah Persentase penurunan potensi konflik.

Tabel 2.2
Matrik Hubungan antara Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik	Meningkatnya Penyelesaian Konflik Sosial Politik	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial Politik

3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Penjabaran pertama dari strategi adalah berupa kebijakan, yaitu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, dan misi organisasi itu. Penjabaran selanjutnya adalah berupa program, yaitu berupa kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan memperhatikan lingkungan strategi yang ada, Strategi yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang ditetapkan sebagai berikut :

-
1. Meningkatkan soliditas dan pengkajian aparat intelijen, lembaga / instansi dan masyarakat dalam deteksi dan cegah dini konflik sosial dan gangguan keamanan secara berkelanjutan.
 2. Memfasilitasi komunikasi antar umat beragama dan aliran kepercayaan.
 3. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Narkoba.
 4. Memfasilitasi hubungan kelembagaan partai politik.
 5. Memfasilitasi organisasi sosial kemasyarakatan dalam mewujudkan stabilitas kehidupan sosial kemasyarakatan
 6. Meningkatkan sosialisasi wawasan kebangsaan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah merupakan pedoman pelaksanaan tindakan (program dan kegiatan) yang akan dilaksanakan. Elemen penting dalam menyiapkan arah kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan.

Arah Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Oleh karena itu Arah Kebijakan yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang dirumuskan sebagai berikut :

1. Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota, Kecamatan dan Desa
2. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar tokoh agama dan masyarakat melalui FKUB

-
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.
 4. Peningkatan pembinaan dan monitoring partai politik
 5. Peningkatan partisipasi politik masyarakat melalui sosialisasi pendidikan politik
 6. Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi masyarakat

4. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dan dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Program yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang berdasarkan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Tahun 2022 sebanyak 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan yang dijabarkan dalam 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan.

5. Kegiatan

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan instansi dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi konkrit / nyata organisasi untuk dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dengan kebijakankebijakan organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut.

Terdapat 11 (sebelas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang pada Tahun 2022 sebagai berikut yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
 6. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

-
3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter
 1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

-
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.
 1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
 1. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
 2. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 1. Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

-
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
 1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

B. PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Sampang merupakan Perjanjian jangka menengah dan bersifat global yang perlu dijabarkan dalam Perencanaan yang lebih mikro dan operasional oleh masing -masing SKPD dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Sampang Tahun 2019-2024 yang tiap tahunnya akan dijabarkan dalam dokumen RKT. Penyusunan RKT berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN & RB) Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Anggaran
1.	Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik	Menurunnya Konflik Sosial	Persentase Penurunan Potensi Konflik Sosial Politik	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1.319.650.635
				Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	132.139.717
				Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	221.135.810
				Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1.576.843.955
				Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	144.353.078

				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.884.125.524
--	--	--	--	---	---------------

Perjanjian Kinerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2022 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di tahun 2022 menjadi tumpuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang untuk mewujudkan kinerja Output ataupun Outcome yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2022.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodic. Penyusunan LKjIP ini didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan perencanaan Strategis dan Rencana Kerja Tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2022

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang pun tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating. dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudiannya sampai pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengoptimalkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan indikator pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan perangkat perencanaan yang telah dibuat.

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan targetsetiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitunganakan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepatuntuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

Pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang tahun 2021 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja.

A. Capaian Kinerja

Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja hasilpengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang tahun 2022 disajikan sebagai berikut :

TUJUAN : Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik

Sasaran : Meningkatnya Penyelesaian Konflik Sosial Politik

Untuk mengetahui keberhasilan capaian sasaran ini menggunakan parameter yang dapat diukur melalui indikator yaitu Persentase potensi konflik sosial yang dicegah, sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.2, sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Pencapaian Kinerja Sasaran I

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	SATUAN	CAPAIAN 2021	TAHUN 2022		
						Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik	Meningkatkan Penyelesaian konflik sosial politik	Persentase Konflik sosial politik yang diselesaikan	%	85,71	100 %	85,71	85,71 %

Pada tahun 2022 untuk di wilayah Kab. Sampang tidak ada konflik sosial yang baru, namun yang ada proses penyelesaian konflik sosial tahun 2012. Pemerintah Kabupaten Sampang terus melaksanakan upaya – upaya penyelesaian konflik sosial di Kabupaten Sampang baik masyarakat yang tinggal di Desa Karang Gayam Kec. Omben dan Desa Blu’uran Kec. Karang Penang serta di Rusunawa Puspa Agro Jemundo Sidoarjo.

Tabel 3.2
Perbandingan capaian persentase penurunan potensi konflik Tahun 2021-2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
				2020	2021
1	Meningkatkan Penyelesaian konflik sosial politik	Persentase Konflik sosial politik yang diselesaikan	100 %	85,71 %	85,71%

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang memetakan data rawan dipetakan menurut bidang ipoleksosbudhankam sebagaimana data pada tabel dibawah ini :

Data Rawan Potensi Konflik di Kabupaten Sampang
Tahun 2021 – 2022

No	Bidang / Aspek	Potensi Konflik	
		2021	2022
1	Bidang Idiologi	2	2
2	Bidang Politik	2	2
3	Bidang Ekonomi	0	0
4	Bidang Sosial Budaya	2	2
5	Bidan Hankam	1	1
Jumlah		7	7

Dari data rawan potensi konflik tersebut diatas kita dapat melihat realisasi sasaran Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang pada tahun 2022 yang indikator sasarannya Persentase Konflik sosial politik yang diselesaikan dengan formula :

$\frac{\text{Jumlah Konflik Sosial yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Konflik yang terjadi}} \times 100\%$:	$\frac{6 \text{ kasus}}{7 \text{ kasus}} \times 100 \%$
	:	$= 85,71 \%$

Dari 7 kasus tersebut hanya dibidang sosial budaya ada 1 kasus yaitu konflik sosial yang belum tuntas penyelesaiannya, sebenarnya bukan kasus konflik sosial baru yaitu konflik sosial tahun 2012 dimana para pengungsi saat ini berada di Rusunawa Puspa Agro Jemundo Sidoarjo. Kendala yang dihadapi saat ini yaitu bagaimana mewujudkan keinginan para pengungsi ini untuk kembali ke tempat tinggalnya sendiri di Desa Karang Gayam Kecamatan Omben dan Desa Blu'uran Kecamatan Karang penang. Upaya Pemerintah Kabupaten Sampang dalam proses penyelesaian konflik di Tahun 2022 direncanakan pemulangan para pengungsi di Rusunawa Puspa Agro Jemundo Sidoarjo dari 81 KK dengan 345 jiwa, Pemulangan Tahap pertama telah dilaksanakan dengan Jumlah 14 KK dengan 53 Jiwa. Pemerintah Kabupaten Sampang terus melakukan upaya untuk melaksanakan pemulangan para pengungsi di Rusunawa Puspa Agro Jemundo Sidoarjo sampai semua para pengungsi pulang ke rumah tinggal sendiri di desa Karang Gayam Kecamatan Omben dan desa Blu'uran Kecamatan Karang penang. Adapun Program yang mendukung Indikator Sasaran Persentase Konflik sosial politik yang diselesaikan ada 1 (satu) Program yaitu Program Peningkatan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasioanal dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial berupa Rakor Tim Penyelesaian Konflik Sosial (PKS) sebanyak 12 kali, Rakor Tim FKDM sebanyak 12 Kali.

Jika realisasi kinerja kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya (3 tahun sebelumnya 2019-2022), maka dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.3.
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI			
			2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatkan Penyelesaian konflik sosial politik	Persentase Konflik sosial politik yang diselesaikan	100%	85.71%	85.71%	85,71	85,71%

Jika realisasi kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir Renstra (Tahun 2024), maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4.
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA (TAHUN 2024)	REALISASI TAHUN 2022	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan Penyelesaian konflik sosial politik	Persentase Konflik sosial politik yang diselesaikan	100%	85,71%	85,71%

Dari tabel 3.4 diatas dapat dijelaskan untuk tingka kemajuan dari akhir renstra Bakesbang dan Polittk Kabupaten Sampang 2019 – 2024 dapat diperoleh rata rata baik.

Jika realisasi kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi kinerja level nasional (*benchmark kinerja*), maka dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.5.
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Nasional

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI NASIONAL	KET
(1)	(2)	(4)	(3)	(4)
Meningkatkan Penyelesaian konflik sosial politik	Meningkatkan Penyelesaian konflik sosial politik	85,71%	-	Tidak tersedia data

Perbandingan realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang dengan realisasi kinerja nasional pada tahun 2022 adalah nihil karena tidak tersedia data realisasi kinerja nasional

B. REALISASI ANGGARAN

1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis / Program		Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1	Meningkatkan Penyelesaian konflik sosial politik	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Meningkatkan Penyelesaian konflik sosial politik	1.682.244.077	23,42 %

Catatan : Persentase anggaran pada masing-masing sasaran strategis dibandingkan dengan keseluruhan (total) anggaran (Belanja Langsung ex Rutin + Pembangunan) pada Bakesbangpol Kab. Sampang Belanja Langsung : Rp. 7.182.654.535,-

2. Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Tahun 2022

Sasaran Strategis / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Sasaran : Meningkatkan Penyelesaian konflik sosial politik. Program : Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Meningkatkan Penyelesaian konflik sosial politik	100 %	0 %	85,71 %	1.682.244.077	1.319.650.635	78,45%

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

3. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan persentase capaian kinerja dan penyerapan anggaran padamasing-masing indikator sasaran, dapat diukur tingkat efisiensi penggunaan sumber daya, sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.4, sebagai berikut :

Tabel 3.6
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Menurunnya Konflik Sosial	Persentase Penurunan Potensi Konflik Sosial Politik	85,71 %	78,45%	1,09 %

Berdasarkan tabel 3.6 diatas terlihat bahwa secara umum target kinerja Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang tahun 2022 dalam kategori berhasil meskipun sasaran belum mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan meskipun mungkin telah dilaksanakan dengan baik, namun keluaran dan hasilnya belum efektif dalam mencapai target yang ditetapkan. Pada periode selanjutnya diperlukan adanya peninjauan kembali terhadap pemilihan program dan kegiatan yang dilaksanakan, agar dapat dipilih program dan kegiatan hanya yang benar-benar berkontribusi langsung terhadap pencapaian target sasaran strategis saja yang menjadi program prioritas serta mendapatkan alokasi pendanaan.

4. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan dilaksanakan mulai dari perumusan rencana keuangan, pelaksanaan pembiayaan kegiatan dan pelaksanaan pelaporan. Penyusunan anggaran keuangan dibuat berdasarkan pola Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang dimana pada Tahun Anggaran Tahun 2022

mendapatkan Alokasi dana untuk program pembangunan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPA-SKPD setelah perubahan) sebesar Rp. 7.182.654.535,- Program Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Sampang dibiayai dari anggaran APBD Tahun 2022. Komposisi anggaran dalam kaitannya dengan upaya mewujudkan prioritas pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang . Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang membelanjakan anggaran daerah sebagai berikut :

Tabel 3.7
Pagu Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN		
		ANGGARAN	REALISASI	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.993.972.624	2.884.125.524	96,33
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.640.559	2.056.320	56,48
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	348.688	291.720	83,66
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	842.190	-	-
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	584.376	558.960	95,65
	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	643.100	-	-
	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	355.037	350.880	98,83
	6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	867.168	854.760	98,57
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.498.414.978	2.448.686.540	98,01
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.497.969.478	2.448.250.490	98,01
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	297.000	291.720	98,22
	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	148.500	144.330	97,19

2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	162.022.362	144.353.078	89,09
	1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter	162.022.362	144.353.078	89,09
	1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	63.105.550	53.915.978	85,44
	2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	98.916.812	90.437.100	91,43
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1.907.723.926	1.576.843.955	82,66
	1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.907.723.926	1.576.843.955	82,66
	1 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	56.478.937	51.242.000	90,73
	2 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12.439.784	9.147.840	73,54
	3 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.838.805.205	1.516.454.115	82,47
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	247.499.322	221.135.810	89,35
	1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	247.499.322	221.135.810	89,35
	1 Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	247.499.322	221.135.810	89,35

5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	189.192.224	132.139.717	69,84
	1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	189.192.224	132.139.717	69,84
	1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	189.192.224	132.139.717	69,84
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasioanal dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.682.244.077	1.319.650.635	78,45
	1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.682.244.077	1.319.650.635	78,45
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	484.133.670	227.170.660	46,92
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.198.110.407	1.092.479.975	91,18
	JUMLAH	7.182.654.535	6.278.248.719	87,41

A. TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI

Beberapa upaya yang dilakukan sebagai tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

REKOMENDASI HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2022		TINDAK LANJUT
A.	Perencanaan Kinerja	
1.	Menerapkan anggaran berbasis kinerja dengan mempertanggungjawabkan kinerja sebelum mengajukan anggaran	Dalam pengajuan anggaran kami mengevaluasi hasil output kinerja tahun sebelumnya, sehingga anggaran yang diajukan untuk tahun berikutnya harus tercapai target output yang direncanakan
2.	Mengaitkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan penganggaran	Pengajuan anggaran kami selalu membreakdown apa yang direncanakan di P-Renstra yang otomatis didasarkan IKU yang dituangkan di P-Renstra
3	Meningkatkan komitmen pegawai dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam sasaran kinerja pegawai (SKP) mulai dari setingkat eselon IV ke atas dengan dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward & punishment	Reward dan punishment telah diterapkan (Reward : Penghargaan ASN Bakesbangpol punishment : Potongan TPP)
B.	Pengukuran Kinerja	
1.	Kualitas Pengukuran	
a.	Agar pengukuran kinerja secara berjenjang dari level staf hingga level tertinggi menggunakan bantuan teknologi	Pengukuran kinerja dikembangkan menggunakan teknologi informasi dan dapat diukur secara maksimal
2.	Implementasi Kinerja	
a.	Agar target kinerja eselon III dan IV dimonitor pencapaiannya	Target kinerja eselon III pada tahun 2022 kami tidak optimal dalam hal ini dikarenakan adanya refocusing anggaran
b.	Agar capaian IKU dimanfaatkan untuk penilaian kinerja	IKU yang di P. Renstra dijadikan acuan kami dalam mencapai target yang ditetapkan

C.	Pelaporan Kinerja	
	Dalam laporan kinerja menyajikan informasi sesuai standard an informasi yang disajikan agar digunakan untuk peningkatan kinerja dan penilaian kinerja	Laporan kinerja telah menyajikan informasi analisis efisiensi dengan menyajikan sumber daya secara lengkap dengan basis data yang memadai
D.	Evaluasi Internal	
1.	Kualitas Evaluasi	
	Lakukan Pemantauan Rencana Aksi untuk mengendalikan kinerja	Pemantauan Rencana Aksi secara berkala setiap triwulan telah dilaksanakan dalam mengendalikan kinerja dan ditindaklanjuti sehingga menunjukkan perbaikan setiap periode
2..	Pemanfaatan evaluasi	
	Lakukan Pemantauan Rencana Aksi untuk memberikan alternative perbaikan yang dapat dilaksanakan	Hasil evaluasi rencana aksi digunakan untuk penyusunan review/perubahan Renstra Bakesbang dan Politik Kab. Sampang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun Anggaran 2022 yang merupakan cerminan dari hasil kinerja Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang selama satu tahun dan diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam lampiran penetapan kinerja tahun 2022

Dalam mewujudkan sasaran-sasaran. Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang telah berusaha untuk mendapatkan keberhasilan capaian yang maksimal melalui kegiatan-kegiatan tahun 2021,dapat diketahui pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang tahun 2019-2024.

Namun tidak dipungkiri ada beberapa kegiatan yang anggarannya tidak terserap seluruhnya atau tidak tercapai 100 % hal tersebut tentu tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi. Sebagai upaya dalam rangka meminimalkan kendala yang ada, Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang terus berupaya mengoptimalkan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang ada serta mengoptimalkan koordinasi dengan instansi/pihak terkait dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi dan menjadi acuan peningkatan kinerja aparatur Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang pada tahun-tahun berikutnya.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang ke depan, maka ada beberapa langkah yang akan

dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang secara umum, antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan agar dokumen perencanaan yang disusun dapat digunakan dan dapat mengurangi kesalahan / keraguan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Menggunakan upaya pemecahan masalah dalam dokumen ini sebagai strategi peningkatan capaian kinerja pada pelaksanaan program / kegiatan tahun selanjutnya.
- c. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.
- d. Memberdayakan sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Sampang secara menyeluruh, efektif, dan efisien.
- e. Menguatkan komitmen dari semua bidang untuk meningkatkan kinerjanya

Melalui LKjIP ini diharapkan terwujudnya peningkatan akuntabilitas serta kinerja instansi pemerintah, dalam hal ini Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang guna tercapainya visi dan misi Kabupaten Sampang.

Sampang, Januari 2023
KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN SAMPANG

ANANG DJOENAEDI SANTOSO, S.Sos,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660125.199403.1.008